

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini akan direview berbagai literatur yang membahas konsep dan teori-teori yang membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu sehingga ditemukan perbedaan maupun urgensi dari penelitian ini. Sedangkan, kerangka pemikiran merupakan penjelasan dari alur logika penjelasan penelitian.

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Menurut *Marshall & Rossman* (2006) tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. *Leedy* (1997) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka mempunyai kegunaan untuk membantu memberi gambaran tentang metoda dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa yang peneliti hadapi.

##### **2.1.1 Penyadapan**

Penyadapan merupakan contoh dari penyalahgunaan perkembangan alat komunikasi secara negatif dalam kancah internasional oleh pihak suatu negara terhadap negara lainnya dan berdampak buruk terhadap hubungan keduanya (*Lusra*, 2014). Aksi penyadapan juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran ketentuan diplomatik yang diatur dalam Konvensi WINA 1961. Pelanggaran yang dilakukan adalah intervensi atau ikut campur urusan negara lain serta dengan sengaja mengambil informasi negara lain baik yang bersifat rahasia atau bukan rahasia tanpa ijin (*Anggraini et al.*, 2016).

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan intersepsi atau penyadapan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Menurut *Hikmawati* (2015), penyadapan pada dasarnya adalah gangguan terhadap komunikasi yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak privasi seseorang dalam berkomunikasi.

Pengalaman beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa serangan siber individual yang tidak terkoordinasi telah menjadi respons yang tak terelakkan terhadap krisis nyata atau yang dirasakan antarnegara. Tindakan peretas individu tidak boleh digabungkan dengan peraturan pemerintah, namun tindakan tersebut tetap berbahaya dan tidak dapat diabaikan. Negara harus mengamankan jaringan mereka untuk melindungi kepentingan nasional (*Rustici*, 2013).

Dalam perspektif internasional, penyadapan termasuk dalam pelanggaran terhadap hak asasi mengenai kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi (*privacy rights*). Hal ini diperkuat dalam beberapa instrumen internasional seperti *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *The European Convention on Human Rights*. Dari beberapa instrumen internasional tersebut, dijelaskan bahwa penyadapan merupakan kegiatan yang dilarang.

Akan tetapi, dalam instansi atau badan penegakkan hukum, tindakan penyadapan boleh dilakukan seperti kewenangan badan narkotika, kepolisian, badan penanggulangan terorisme, dan badan penenggak korupsi. Akan tetapi tindakan penyadapan tidak boleh dilakukan apabila tidak ada bukti permulaan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menjamin perlindungan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sehingga tindakan penyadapan dilarang. Penyalahgunaan tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sangat dilarang dan telah

diatur dalam Undang-Undang ITE No. 11 Republik Indonesia di bawah beberapa instansi yang berwenang. Tindakan criminal saat ini memang mengalami perubahan dan menjarah kearah dunia teknologi informasi (Petre, 2014). Reaksi dalam tindakan kriminal jenis penyadapan haruslah kuat. Penegakan hukum dan penguatan peraturan harus saling tersinkronisasi antarlembaga yang berwenang.

### **2.1.2 Teori Realisme**

Hans Morgenthau (1972) telah membuahakan sebuah pemikiran tentang kondisi negara-negara didunia pada masa perang. Negara-negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Negara lain akan menghasilkan banyak interaksi. Negara-negara eropa seperti perancis dan german yang mampu menduduki banyak Negara di eropa yang disebabkan oleh kondisi geografis mereka yang berdekatan. Berbeda dengan inggris, negara tersebut tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh perancis maupun jerman karena faktor geografis.

Menurut Jack Donnelly (2005) politik didalam realisme adalah sebuah tradisi analisis yang menekankan pada negara dalam mencapai kekuasaan politik dan kepentingan nasionalnya. Realisme juga menekankan pada politik yang dipaksa oleh keinginan egoisme manusianya didalam sebuah anarki sistem pemerintahan internasional sehingga realisme menekankan keunggulan kekuatan, kepentingan pribadi, dan konflik

Sedangkan menurut Kenneth waltz (1991:29) mengatakan bahwa struktur internasional berkembang dari interaksi antar negara dan kemudian memaksanya untuk bertindak satu sama lain. Didalam realism tidak mengenal hierarki karena semua adalah sama dan bertindak untuk bersaing satu sama lain.

Didalam realisme juga melihat konflik tidak timbul dari sebuah masalah yang terjadi khusus pada aktor. Jauh dari konflik yang diinginkan, para aktor sebenarnya lebih menyukai kerjasama. Mereka tidak tahu atau tidak tahu informasi. Dalam lingkungan anarki, bahkan mereka yang

mampu menguasai keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan didorong oleh rasa takut untuk memperlakukan orang lain sebagai musuh.

Sehingga didalam kasus yang terjadi antara Indonesia dan Australia, teori realisme membantu dalam menganalisis pengaruh geografis dan kepentingan para aktor dalam melakukan hubungan kerjasama. Konflik atau hubungan yang selalu naik dan turun antara Indonesia dan Australia juga dapat dilihat dari kaca mata realisme berdasarkan penjelasan diatas.

### **2.1.3 Teori Konstruktivisme**

Teori konstruktivisme cenderung condong kearah pembangunan hubungan sebuah negara. Dibandingkan dengan teori lain, teori konstruktivisme menekankan pada ide-ide yang terkonstruksi untuk membangun kearah perbaikan. Pemikiran konstruktivisme lebih mengutamakan kepentingan nasional, norma-norma, dan nilai yang dapat menjadikannya alat dalam hubungan antar negara.

Konstruktivisme melihat dunia sebagai proyek yang sedang dikerjakan, seperti menjadi apa, bukan apa adanya. Tidak seperti idealism dan pasca-strukturalisme dan posmodernisme, yang mengambil dunia hanya karena dapat dibayangkan atau dibicarakan, konstruktivisme menerima bahwa tidak semua laporan memiliki nilai epistemik yang sama (*Adler*, 2002). Konstruktivis bersifat materialis yakni memfokuskan pada bagaimana distribusi (penyebaran), kekuatan, material seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, yang memengaruhi keseimbangan kekuatan dan menjelaskan perilaku negara; konstruktifis memfokuskan pada kesadaran manusia dan tempatnya di dunia.

Bagi penganut konstruktivis, sistem internasional itu tidak ada dengan sendirinya. Ia ada melalui kesadaran intersubjektif orang-orang, dibentuk oleh ide-ide dan murni usaha intelektual dan penemuan manusia. Tidak ada hukum alam tentang masyarakat, politik, dan ekonomi; tidak ada sistem sosial yang berkembang dengan sendirinya tanpa campur tangan ide dan pemikiran manusia. Sistem internasional itu merupakan hasil ide-

ide, suatu bentuk pemikiran, suatu sistem norma yang diatur oleh orang-orang tertentu pada satu waktu dan tempat tertentu karena sistem internasional itu bersifat relatif dan hasil bentukan bersama, ia juga bisa berubah bila manusia mulai memikirkan cara baru dan mendukung norma-norma baru yang secara radikal berbeda dengan yang lama (*Sorensen & Jacson, 2007*).

Menurut *Guzzini dan Leander (2005)* terdapat tiga aspek umum konstruktifisme. *Pertama, intersubjective understanding*, yakni politik global dikendalikan oleh ide-ide, norma-norma, konsepsi-konsepsi, asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang secara luas dimiliki secara bersama-sama oleh para aktor. *Kedua*, hubungan struktur ide dan perilaku aktor, yakni struktur ideasional memiliki pengaruh yang membentuk (*constitutive*) dan mengatur (*regulative*), bukan pengaruh langsung yang bersifat kausalitas terhadap aktor-aktor. *Ketiga*, hubungan agen dan struktur, yakni struktur ideasional dan aktor-aktor saling membentuk dan menentukan satu sama lain. Struktur membentuk kepentingan dan identitas aktor tetapi struktur juga diproduksi, direproduksi, dan diubah melalui praktik terus-menerus dari para aktor.

Konstruktivisme membahas mengenai identitas dan kepentingan aktor-aktor yang sudah terkonstruksi secara sosial dan bersamaan dengan hal tersebut muncul pula kepercayaan bahwa perubahan dapat terjadi bahkan dalam praktik dan institusi institusi yang pada awalnya dianggap paling mustahil untuk berubah. Dilema keamanan, sebagai contoh, bukan hanya dibuat dari fakta bahwa dua negara berdaulat memiliki senjata nuklir. Struktur sosial memiliki tiga elemen: pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktek (*Wendt, 1992*).

Berdasarkan gambaran teori konstruktifisme, dapat dilihat bagaimana identitas Indonesia-Australia dibentuk berdasarkan perbedaan suku, ras, dan budaya. Indonesia-Australia memahami akan arti menjadi tetangga yang bersahabat. Kedua negara mengkonstruksikan dirinya saling membutuhkan satu sama lain dan melakukan kerja sama guna meningkatkan kepercayaan sebagai negara yang bertetangga dan bersahabat.

#### 2.1.4 Teori Komunikasi Internasional

Komunikasi internasional secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi antarbangsa. *Wilbur* (1954) menjelaskan komunikasi internasional sebagai komunikasi politik yang dilaksanakan oleh negara dan dimasukkan ke dalam bentuk kegiatan seperti propaganda, informasi, diplomasi, dan pertahanan keamanan suatu negara.

Menurut formulasi tersebut, semua kegiatan komunikasi internasional itu ditujukan umumnya untuk memenangkan kepentingan bangsa-komunikator terhadap bangsa-bangsa komunikannya. Kenyataannya, walaupun suatu kunjungan ke negara lain itu hanya dilaksanakan oleh seseorang atau golongan atau perorangan, tetapi efeknya selalu melihat kedua bangsa yang bersangkutan. Termasuk bila komunikasi internasional, misalnya digunakan untuk menyampaikan pesan politik atau kegiatan-kegiatan yang berlatar belakang politik antar negara. Komunikasi internasional juga mempelajari pernyataan antar negara/pemerintah/bangsa yang bersifat umum melalui lambang-lambang yang berarti (*Sastropetro dan Santoso, 1988*).

Komunikasi internasional berfungsi untuk mendinamisasikan hubungan internasional yang dijalin oleh dua negara atau lebih. Komunikasi internasional juga membantu mencapai tujuan hubungan internasional dan meningkatkan capaian tujuan hubungan internasional dan meningkatkan capaian yang dikehendaki dari hubungan tersebut.

Berdasarkan teori komunikasi internasional, dapat digambarkan bahwa komunikasi yang disampaikan Indonesia kepada Australia pascakasus penyadapan adalah cenderung negatif. Hal ini dibuktikan dengan sikap Indonesia yang tegas untuk memutuskan hubungan diplomatik Australia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan membatalkan latihan militer bersama antara Angkatan Udara RI dan Australia. Sementara itu, komunikasi yang dibawa Australia cenderung positif. Australia menganggap kebijakan yang diambil Indonesia sangat merugikan. Australia terus membangun hubungan baik dengan Indonesia guna mendapatkan kepercayaan kembali. Berdasarkan

komunikasi yang disampaikan oleh kedua negara tersebut, dapat disimpulkan sikap yang diambil oleh masing-masing negara bahwa Australia masih membutuhkan Indonesia sebagai partner yang mendukung kepentingan nasional Australia.

### **2.1.5 Konsep Diplomasi Pertahanan**

Konsep diplomasi pertahanan sebenarnya sudah ada sejak lama dalam istilah kerja sama militer atau bantuan militer. Sejak tahun 1990-an, militer dan departemen pertahanan telah meningkatkan hubungan militer antarnegara di dalam masa damai. Konsep ini diprakarsai oleh NATO yang sebagian besar anggotanya adalah Eropa Barat yang melakukan kerja sama dengan mantan musuh mereka yakni Eropa Timur (*Cottey and Forster, 2004*).

Konsep diplomasi pertahanan sebenarnya merupakan penengah dari tujuan utama kebijakan keamanan dengan penggunaan atau fungsi kekuatan militer. Tujuan utama dari kebijakan keamanan adalah mencegah serangan dari musuh, sedangkan pembangunan kekuatan militer digunakan untuk berperang dan menghancurkan lawan. Diplomasi pertahanan sebagai kunci utama penyeimbang antara kebijakan pertahanan dengan kekuatan militer (*Cottey and Forster, 2004*).

Dalam perkembangannya, menurut *Cottey and Forster (2004)*, diplomasi pertahanan telah mengalami perubahan tujuan. *Pertama*, dahulu diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk mengimbangi musuh, akan tetapi sekarang diplomasi pertahanan digunakan untuk membantu meningkatkan kerja sama dengan mantan musuh. Seperti usaha yang dilakukan Blok Barat untuk melakukan kerja sama militer dengan Rusia dan Tiongkok. *Kedua*, diplomasi pertahanan dahulunya dipakai untuk menjaga rezim otoriter, berubah menjadi mempromosikan kontrol demokrasi sipil yang mendukung demokrasi liberal dan pemerintahan yang baik. *Ketiga*, kerja sama militer digunakan untuk mendukung negara sahabat dalam mengembangkan pembangunan kapasitas militernya dalam rangka

perdamaian dan operasi perdamaian. Berikut dalam Tabel 2.1, bentuk aktivitas diplomasi pertahanan.

Sebagai sebuah instrumen dalam pembangunan diplomasi pertahanan dan pencegahan konflik antara musuh yang potensial, diplomasi pertahanan dapat digunakan dalam beberapa cara dan dijalankan dalam beberapa level yang berbeda. *Pertama*, diplomasi pertahanan dapat bekerja sebagai representasi peran politik sebuah Negara. *Kedua*, diplomasi pertahanan dapat menjadi pesan transparansi didalam hubungan pertahanan suatu negara. *Ketiga*, diplomasi pertahanan dapat dimaksudkan dalam pembangunan persepsi dari kepentingan nasional suatu negara. *Keempat*, diplomasi pertahanan juga mampu merubah *mind-set* militer negara partner. *Kelima*, diplomasi pertahanan dapat digunakan untuk mendukung reformasi pertahanan negara partner. *Keenam*, diplomasi pertahanan digunakan untuk membantu negara partner dalam bekerja sama di bidang lain.

Tabel 2.1 Bentuk Diplomasi Pertahanan

No	Bentuk Diplomasi Pertahanan
1	Hubungan bilateral dan multilateral antara senior militer dengan pertahanan sipil
2	Pertemuan atase pertahanan ke luar negeri
3	Persetujuan bilateral kerjasama pertahanan
4	Pelatihan militer dan personil pertahanan sipil luar negeri
5	Pertukaran tenaga ahli manajemen pertahanan
6	Pertukaran personil militer dan unit militer, serta kunjungan kapal
7	Penempatan pesonil sipil atau militer di Negara partner
8	Penyebaran tim pelatih
9	Pertukaran alutsista
10	Latihan bersama bilateral atau multilateral

Sumber: *Cottey and Forster* (2004)

### 2.1.6 Diplomasi Pertahanan Indonesia

Diplomasi pertahanan Indonesia, menurut *Puspen TNI* (2006), dilakukan untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia di tingkat global, regional, dan bilateral.

Di tingkat regional, diplomasi pertahanan Indonesia, sangat diwarnai tarik menarik antara keinginan negara-negara ASEAN untuk menginisiasi pengaturan keamanan (*security arrangement*) yang ditopang pilar-pilar *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*, *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)*, Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara, serta *ASEAN Security Community*, dengan politik realis AS untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara (*Puspen TNI*, 2006).

Inisiatif pengaturan keamanan ASEAN dilakukan melalui berbagai mekanisme diplomatik, seperti: ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, Shangri-la Dialogue, ASEAN +1, dan ASEAN +3. Saat ini, forum-forum tersebut masih belum mengarah ke formalisasi kerja sama keamanan di Asia Tenggara. Forum-forum tersebut masih mengandalkan keberadaan proses-proses diplomatik yang diharapkan akan meningkatkan rasa saling percaya (*trust building*) antarnegara (*Puspen TNI*, 2006).

Diplomasi pertahanan Indonesia akan sangat ditentukan oleh dinamika keamanan regional. Indonesia harus kembali aktif mengembangkan gagasan-gagasan inovatif tentang pengaturan keamanan regional di Asia Tenggara yang di dalamnya mengatur pelibatan negara-negara besar. Selain itu, diplomasi pertahanan Indonesia harus selalu memperhitungkan dan mengantisipasi kepentingan pragmatis jangka pendek negara lain.

Diplomasi pertahanan Indonesia yang baik pada akhirnya harus dapat memanfaatkan kepentingan pragmatis tersebut untuk peningkatan stabilitas keamanan regional dan kemandirian pertahanan Indonesia (Simamora, 2013). Adapun bentuk diplomasi pertahanan Indonesia yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut (lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia

NO	BENTUK	APLIKASI
1	Operasi Bilateral  Operasi Multilateral  Operasi Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patroli terkordinasi Indonesia-Malayasia di selat malaka</li> <li>- Patroli terkordinasi Indonesia-Singapura di selat Singapura</li> <li>- Patroli terkordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi</li> <li>- Patroli terkordinasi Indonesia-India di Laut Andaman</li> <li>- Patroli terkordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru</li> <li>- The Malacca Straits Security Patrol</li> <li>- Operasi Perdamaian (PKO) seperti UNIFIL Maritime Task Force.</li> <li>- Pertukaran intelijen keamanan maritime melalui Information Fusion Center</li> </ul>
2	Latihan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latma Indosin antara TNI AL dengan Republic of Singapore Navy.</li> <li>- Elang Thainesia antara TNI AU dengan Royal Thai Air Force</li> <li>- Darsasa Malindo antara TNI AD dengan Tentera Diraja Malaysia.</li> <li>- Cobra Gold Joint Training</li> <li>- Kakadu</li> <li>- RIMPAC</li> <li>- Latihan Rutin TNI dengan Australian Defence Force (ADF) meliputi New Horizon dan Rajawali Ausindo</li> <li>- Latihan CARAT antara TNI AL dengan US Navy</li> </ul>
3	Pendidikan Militer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengirim perwira siswa ke lembaga pendidikan militer Negara mitra kerja sama</li> <li>- Menerima perwira siswa dari Negara mitra untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan TNI</li> <li>- International Military Education and Training (IMET) (Negara Mitra: Amerika Serikat, Australia, Asean, China, India, dan Korsel)</li> </ul>
4	Kerja sama Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asean Defense Minister Meeting (ADMM)</li> <li>- Asean Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus)</li> <li>- Asean Regional Forum (ARF)</li> </ul>
5	Industri Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerja sama dengan Korea Selatan, Belanda, Brazil, Ceko, Australia, dan Rusia.</li> </ul>

Sumber: Simamora (2013)

Konsep diplomasi pertahanan digunakan untuk melihat bentuk diplomasi pertahanan Indonesia-Australia dalam rentang waktu 2013-2016. Konsep yang sudah dijelaskan diatas nantinya memberikan gambaran bagaimana dampak naik turunnya hubungan Indonesia-Australia terhadap diplomasi pertahanan.

### 2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa jurnal, artikel, tesis, atau disertasi dari peneliti lain baik internasional maupun nasional yang menulis mengenai topik yang sama guna mendukung penelitian. Maka peneliti memasukan empat penelitian terdahulu yakni:

Artikel pertama adalah tesis Adrie Delyardi, mahasiswa prodi damai dan resolusi konflik Universitas Pertahanan angkatan 2013 yang berjudul “Komunikasi Strategis Indonesia dalam penyelesaian kasus penyadapan informasi: Studi kasus penanganan konflik diplomatic Indonesia-Australia. Hasil dari artikel ini adalah penerapan enam langkah *roadmap* Indonesia dalam melakukan komunikasi strategis dalam menyelesaikan kasus penyadapan Australia. Komunikasi strategis tersebut adalah koordinasi masing-masing lembaga baik Indonesia-Australia. Melalui komunikasi strategis masing-masing negara mengembangkan posisi tawar mereka dan pembuatan keputusan strategis dalam bernegosiasi selama pertemuan kepala negara. Indonesia juga menerapkan *leadership* yang bagus di dalam komunikasi strategis. Hal itu memberikan dampak yang positif terhadap isu yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing Negara.

Artikel kedua adalah jurnal internasional yang berjudul “*Indonesia, Australia and the Edward Snowden Legacy: Shifting asymmetries of Power*”. Artikel ini tulis oleh Richard Tanter, seorang peneliti senior dari Nautilus Institut dan pengajar ilmu sosial dan politik *the university of Melbourne*, dalam jurnal *The Asia-Pacific Journal*. Artikel ini berisi tentang analisis dokumen Edward Snowden yang berisi bukti tindakan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap beberapa pemimpin Indonesia. Richard Tanter melihat bahwa keunggulan Australia sebagai sekutu Amerika Serikat membuatnya merasa unggul dalam teknologi karena Indonesia merupakan target strategis bagi intelijen Australia. Terbongkarnya aksi penyadapan ini memberikan kegelisahan bagi Australia akan hubungannya dengan Indonesia. Australia masih menganggap Indonesia sebagai partner penting dalam mengkampanyekan dalam penanganan imigran.

Artikel ketiga adalah tesis dari Pinto Zakiri Handoko, Mahasiswa Sastra Inggris Universitas Brawijaya, berjudul *“Politeness Strategies in Tony Abbott’s Speech Concerning Australia-Indonesia Tapping Issue”*. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana cara Perdana Menteri Australia Tony Abbot berpidato dalam menyelesaikan kasus penyadapan yang dituduhkan pemerintah Indonesia. artikel ini membogkar bentuk komunikasi Tony Abbot yang cenderung kearah positif. Terbukti dengan cara berbicara yang sopan dan strategis agar pendengar setuju akan opininya bahwa intelijen Australia melakukan aksi penyadapan demi melindungi kepentingan negaranya dan sekutunya.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian	Peneliti	Metode	Tahun	Hasil Penelitian
Komunikasi Strategis Indonesia Terhadap Australia Sebagai Resolusi terhadap kasus Penyadapan	Adrie Delyardi	Deskriptif Analitik	2014	Komunikasi strategis yang dilakukan adalah melalui koordinasi proses pada level pemimpin Negara. Implementasinya melalui menteri Luar negeri sebagai sector vocal G to G.
Indonesia, Australia and the Edward Snowden Legacy: Shifting asymmetries of power	Richard Tanter	Deskriptif Analitik	2014	Australia melihat keunggulannya sebagai sekutu amerika membuatnya unggul dalam teknologi dibandingkan Indonesia. hal inilah yang melatarbelakangi tindakan penyelewengan berupa aksi penyadapan terhadap pemimpin Indonesia
Politeness Strategies in Tony Abbot’s	Pinto Zakiri Handoko	Deskrip Kualitatif	2014	Perdana Menteri Australia Tony Abbot berpidato dalam menyelesaikan kasus penyadapan yang dituduhkan

Speech Concerning Australia- Indonesia Tapping Issue				pemerintah Indonesia. artikel ini membogkar bentuk komunikasi Tony Abbot yang cenderung kearah positif. Terbukti dengan cara berbicara yang sopan dan strategis agar pendengar setuju akan opininya bahwa intelijen Australia melakukan aksi penyadapan demi melindungi kepentingan negaranya dan sekutunya.
---	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana pengaruh hubungan Indonesia-Australia yang selalu mengalami kondisi naik dan turun pascakasus penyadapan dan dampaknya terhadap diplomasi pertahanan yang sudah terjalin.

### 2.1.8 Kerangka Pemikiran

Munculnya kasus baru pascapenyadapan mengindikasikan hubungan Indonesia-Australia selalu mengalami dinamika naik turun. Upaya perbaikan yang dilakukan kedua negara selalu saja digagalkan dengan permasalahan baru. Diplomasi pertahanan yang diterapkan kedua negara juga selalu digunakan sebagai upaya menurunkan tensi dan membangun kembali hubungan baik.

Penelitian ini melihat upaya diplomasi pertahanan yang diterapkan oleh instansi pertahanan pemerintah seperti kementerian pertahanan dan Mabes TNI. Penelitian ini juga menganalisis penyebab munculnya kasus baru pascakasus penyadapan. Metodologi yang digunakan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Analisis menggunakan *grand theory* realisme dan konstruktifisme yang melihat identitas kedua negara yang saling melakukan kerjasama yang kemudian dijabarkan menjadi sebuah hubungan yang saling membutuhkan

satu sama lain. Data yang dibutuhkan yaitu bentuk diplomasi pertahanan Kementerian Pertahanan dan analisis mengenai penyebab kembali buruknya hubungan Indonesia-Australia pascakasus penyadapan. Data tersebut didapatkan dari wawancara langsung narasumber yang mengetahui langsung konsep diplomasi pertahanan Kementerian Pertahanan dan kasus penyadapan yang terjadi tahun 2013. Data juga didapatkan dari hasil studi literature beberapa buku, jurnal, tesis, disertasi, laporan, artikel, dan berita media massa yang berhubungan dengan topik yang diteliti. (Lihat gambar 2.1)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

